

Problematik Parpol di Indonesia: Kasus PDI

M. Riza SIHBUDI

Pendahuluan

DIBANDINGKAN tiga pemilu sebelumnya pada masa Orde Baru (1971, 1977, dan 1982), dalam Pemilu 1987 yang baru lalu jumlah suara maupun kursi DPR yang diraih Partai Demokrasi Indonesia (PDI) mengalami kenaikan yang cukup berarti. Bahkan jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 1982, kenaikan yang dicapai PDI dalam Pemilu 1987 mengejutkan banyak kalangan, termasuk di kalangan tokoh-tokoh PDI sendiri. Bila dalam Pemilu 1982 partai ini hanya meraih 7,88% suara dan 24 kursi DPR, maka pada Pemilu 1987 PDI berhasil meraih 10,87% suara serta 40 kursi DPR.¹

Keberhasilan PDI tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor, seperti banyaknya eks pendukung PNI yang "pulang kandang," adanya dukungan dari generasi muda, sikap ABRI yang lebih netral, dan lain sebagainya.

¹Laporan Pemilu Tahap II, PPM-LIPI/Depdagri, hal. 253-254. Juga hasil-hasil yang diraih PDI dalam Pemilu-pemilu 1971 dan 1977.

Sebagai satu organisasi politik yang dalam sejarahnya tak pernah lepas dari masalah pertentangan di kalangan pemimpinnya, keberhasilan ini tentu saja diharapkan akan membawa angin segar dalam tubuh PDI. Dalam ruang lingkup (*scope*) yang lebih luas, makin kuatnya PDI juga diharapkan akan menjadi salah satu pemacu guna mempercepat proses "demokratisasi" di negara kita.

Namun, bila dilihat dari apa yang terjadi dalam Kongres PDI III (April 1986) serta kasus tiga calon anggota DPR dari Fraksi PDI yang tidak mau tunduk pada peraturan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PDI, maka partai ini sebenarnya masih memendam potensi konflik yang setiap saat bisa muncul ke permukaan. Bila ini terjadi, akan memburyarlah kepercayaan yang telah diberikan oleh pendukung PDI selama masa Pemilu 1987 yang lalu.

Potensi konflik hanya salah satu masalah yang dihadapi partai ini. PDI tampaknya masih akan dihadapkan pada sejumlah masalah lain, seperti masalah identitas partai

(khususnya sejak diberlakukannya Pancasila sebagai satu-satunya asas), serta hubungan partai ini dengan ormas-ormas dan unsur-unsur eks pendukung PDI.

Tulisan ini akan mencoba mengkaji permasalahan dan problematika yang dihadapi PDI serta bagaimana masa depan partai ini, terutama setelah mereka cukup berhasil dalam Pemilu 1987. Data-data yang dipergunakan selain bahan-bahan tertulis, juga dilengkapi dengan penelitian lapangan dan wawancara dengan sejumlah tokoh/pimpinan PDI, ormas-ormas dan unsur-unsur eks pendukung PDI, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Masalah Konflik Intern

Sejak terbentuknya, 10 Januari 1973, hingga saat ini, PDI belum berhasil mengatasi masalah pertentangan di kalangan elite kepemimpinannya. Masalah konflik intern hampir selalu muncul sebagai "warna" yang paling menonjol dalam perjalanan partai ini.² Konflik di dalam tubuh PDI, sebagaimana yang terjadi dalam tubuh PPP (Partai Persatuan Pembangunan), tidak hanya mencerminkan konflik antar-unsur. Sebagaimana diketahui, sebagian besar konflik di dalam tubuh PDI justru melibatkan tokoh-tokoh yang berasal dari unsur yang sama, yaitu PNI (Partai Nasional Indonesia).

Hal itu menunjukkan bahwa konflik di dalam tubuh PDI mengandung dua dimensi, yaitu dimensi "konflik warisan" dan dimensi kepentingan pribadi (*vested interest*). Pada dimensi pertama ("konflik warisan"), di mana konflik di dalam tubuh PDI "diba-

wa" oleh eks pendukung PNI, terdapat dua kubu yang saling berhadapan, yaitu kubu "garis keras" dan kubu "moderat" atau bisa juga disebut sebagai kelompok "kompromis." Dalam setiap konflik yang terjadi, kubu "garis keras" selalu tersingkir. Sebaliknya kubu "moderat" selalu keluar sebagai "pemenang." Contoh yang masih hangat adalah konflik antara kelompok Sanusi-Usep ("garis keras") dan kelompok Isnaeni-Sunawar ("moderat") pada tahun 1977, yang berakhir dengan tersingkirnya kelompok Sanusi-Usep.

Namun yang perlu diingat, kemenangan kubu "moderat" atas kubu "garis keras," hampir selalu terjadi berkat campur tangan birokrasi.³ Hal ini sejalan dengan garis kebijaksanaan pemerintah yang memang berusaha menampilkan figur-figur politik yang tidak terlalu besar komitmennya pada ideologi lain (selain Pancasila). Kubu "garis keras" pada umumnya didukung tokoh-tokoh PNI yang masih kuat komitmennya pada ideologi marhaenisme.

Dalam perkembangannya, konflik di dalam tubuh PDI juga menampilkan dimensi kepentingan pribadi. Hal ini, misalnya, terlihat jelas dalam konflik yang mewarnai PDI pada saat partai ini menyelenggarakan Kongresnya yang ketiga (15-17 April 1986). Waktu itu Kongres PDI gagal memilih ketua baru untuk menggantikan Sunawar Soekowati yang meninggal dunia empat bulan sebelumnya. Akibatnya, pemerintah -- dalam hal ini Mendagri -- "terpaksa" turun tangan.

³Mengomentari campur tangan birokrasi dalam kasus konflik Sanusi-Usep Vs. Isnaeni-Sunawar, Sanusi Hardjadinata (eks Ketua Umum PDI) mengatakan, "Dulu saya sudah bilang kepada Pak Harto supaya pemerintah terbuka, seperti saya juga selalu berusaha terbuka. Tapi nyatanya dalam kasus Isnaeni, mereka tidak terbuka." Selanjutnya lihat *Kompas*, 29 November 1978.

²Editor. 29 Agustus 1987, menyebut PDI sebagai partai yang gemar "bertikai"; Lihat juga Manuel Kaisieppo, "Dilema Partai Demokrasi Indonesia: Perjuangan Mencari Identitas," *Prisma* 12 (Desember 1981), hal. 68-83.

Kemudian terbentuklah DPP-PDI di bawah pimpinan Ketua Umum, Soerjadi, yang "dibidani" Mendagri Soepardjo Rustam. Padahal nama Soerjadi selama berlangsungnya kongres tidak diunggulkan.⁴ Justru yang semula dianggap sebagai "calon kuat," yaitu Hardjantho Sumodisastro (salah seorang Wakil Ketua DPR periode 1982-1987), malah tidak terpilih.

Sebenarnya keriuhan dalam Kongres III PDI terkait dengan rentetan konflik (yang berdimensi kepentingan pribadi) yang terjadi sebelumnya. Konflik tersebut terjadi antara Sunawar Soekowati dan Hardjantho yang kemudian masing-masing membentuk "kubu." Konflik Sunawar-Hardjantho bermula dari munculnya pernyataan Sunawar (dalam salah satu pidatonya di tahun 1985) bahwa negara Indonesia adalah "negara sekuler." Pernyataan ini menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan PDI sendiri maupun di kalangan masyarakat luas. Sikap pro dan kontra di kalangan PDI kemudian dipertajam dengan munculnya "masalah" Kongres III. Kubu Hardjantho menginginkan diselenggarakannya kongres sebelum Pemilu 1987. Namun ini ditolak oleh kubu Sunawar. Menurut Sunawar, kongres sebaiknya diadakan setelah pemilu, sebelum pemilu cukup diadakan munas (musyawarah nasional) saja.⁵ Dari sini terlihat, bahwa Sunawar di satu pihak, dengan menolak kongres, masih tetap ingin mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Umum DPP-PDI.

⁴Beberapa hari menjelang kongres, Hardjantho mengatakan bahwa Soerjadi tidak memenuhi syarat sebagai calon ketua. Ucapan senada juga dikeluarkan oleh Ketua Umum DPD-PDI DKI Jakarta, Ipiq Asmasubrata. Menurut Ipiq, kalau Soerjadi terpilih, ini tidak lucu, sebab hasil dorongan dari luar. Bahkan menurut sebuah sumber, hanya beberapa hari menjelang kongres, Soerjadi baru mengurus kartu anggota PDI. Lihat *Tempo*, 19 April 1986, hal. 12-13.

⁵*Tempo*, 18 Januari 1986, hal. 16.

Di lain pihak, ada kesan kuat bahwa Hardjantho berambisi menggeser Sunawar. Dengan munculnya isu "negara sekuler" yang merugikan nama baik Sunawar (si pencetus isu), Hardjantho setidaknya merasa mempunyai kans untuk menggantikan Sunawar dalam suatu kongres.

Konflik antara kubu Sunawar dan kubu Hardjantho agak mereda setelah meninggalnya Sunawar (Januari 1986), dan -- untuk sementara -- kubu Hardjantho tampak mendapatkan "angin," yaitu dengan diselenggarakannya kongres (bukan munas sebagaimana dikehendaki kubu Sunawar) pada bulan April 1986. Namun dalam kenyataannya, Hardjantho gagal mewujudkan ambisinya untuk menjadi Ketua Umum DPP-PDI. Hal ini membuktikan masih kuatnya pengaruh kubu Sunawar. Di samping itu, terdapat kecenderungan yang kuat baik di kalangan generasi muda PDI maupun di kalangan birokrasi untuk menampilkan tokoh yang bebas dari "noda" konflik masa lalu. Dalam konteks ini barangkali bisa dipahami mengapa Soerjadi yang akhirnya "terpilih" sebagai Ketua Umum DPP-PDI sebagai "hasil" kongres partai ini yang ketiga. Meskipun secara organik, Soerjadi tidak pernah duduk dalam kepengurusan PDI, namun ia dikenal sebagai seorang aktivis partai yang tidak pernah terlibat dalam konflik intern yang terjadi sebelumnya.⁶

Tampilnya DPP-PDI di bawah Soerjadi, yang sebagian besar didukung tokoh-tokoh generasi muda, tampak menghembuskan angin segar dalam tubuh partai ini. Apalagi dengan keberhasilan PDI dalam Pemilu 1987. Tidak mengherankan bila kemudian banyak pujian dan sanjungan di alamatkan ke Soerjadi dan kawan-kawan.

Akan tetapi tidak berarti konflik intern

⁶*Tempo*, 19 April 1986, hal. 12-13.

dalam tubuh PDI telah berakhir. Tidak sedikit tokoh-tokoh tua, terutama tokoh-tokoh eks-PNI, dengan alasan yang bervariasi, kurang begitu senang dengan tampilnya generasi Soerjadi. Sebagian disebabkan karena faktor kepentingan pribadi. Sebagian lagi disebabkan DPP-PDI sekarang dinilai "terlalu dekat dengan penguasa," seperti pernah oleh eks tokoh PNI, Manai Sophian.⁷ Juga ada tokoh PDI yang kurang senang dengan manajemen partai yang diterapkan DPP sekarang.⁸ Dan, yang tak kalah pentingnya, muncul kesan bahwa "prinsip-prinsip musyawarah" belum sepenuhnya dijalankan oleh DPP-PDI di bawah Soerjadi.⁹

Hal-hal di atas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan konflik intern di dalam tubuh PDI masih tetap potensial, yang sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan. Sebagai contoh, munculnya kasus DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PDI "tandingan" di Bandung, hanya sekitar setengah tahun setelah berakhirnya Kongres III. Kasus ini bermula dari tindakan DPP-PDI yang mengangkat Dodo Gandamihardja sebagai Pjs. Ketua DPC-PDI Kodya Bandung, Agustus 1986. Padahal Ketua DPC-PDI Kodya Bandung waktu itu, Tarwia Sutendi, belum diberhentikan atau dipecat. Dalih yang dipakai DPP untuk mengangkat Dodo Gandamihardja, adalah dalam rangka reorganisasi dan restrukturisasi PDI Bandung. Tarwia Sutendi yang menilai tindakan

⁷Wawancara dengan Manai Sophian, Jakarta, 27 Juli 1987.

⁸Hardjantho, misalnya menilai DPP-PDI sekarang mengelola partai "bak seorang manajer mengurus ekspedisi muatan kapal laut, padahal mengurus partai lain dari mengurus barang." *Tempo*, 17 Januari 1987, hal. 13-14.

⁹Wawancara dengan Supomo salah seorang pimpinan Pemuda Demokrat Sumatera Utara, Medan, 7 September 1987.

DPP itu sebagai sewenang-wenang, berhasil menghimpun sekitar 80 tokoh PDI Bandung. Pada tanggal 1 Oktober 1986, mereka (Tarwia dan kawan-kawan) mengirimkan surat protes ke alamat DPP-PDI. Isinya, mereka menganggap pengajuan calon-calon anggota DPR dan DPRD (yang diajukan DPD Jawa Barat dan DPC Bandung) sebagai "dilakukan tanpa didasarkan pada asas musyawarah dan mufakat."¹⁰ Tarwia kemudian dipecat sebagai anggota partai oleh DPP. Namun, enambelas Komisariat PDI yang ada di Bandung segera menyatakan berdiri di belakang Tarwia dan masih mengakuinya sebagai Ketua DPC yang sah. Kasus ini berakhir dengan Hijrahnya 26.328 warga PDI (dipimpin Tarwia dan kawan-kawan) ke Golkar.¹¹

Contoh lain dari masih adanya potensi konflik di tubuh PDI, adalah "pembangkangan" tiga anggota DPR Fraksi PDI terhadap keputusan DPP-PDI No. 059/1986. Ini merupakan konflik intern pertama yang "meletus" setelah Pemilu 1987. SK DPP-PDI No. 059/1986 antara lain berisi: masa tugas anggota DPR F-PDI dibatasi hanya dua kali (dua periode) saja. Alasannya, untuk memberi kesempatan kepada generasi yang lebih muda. Mereka yang telah dua kali menjalani masa tugas (selama 10 tahun) di DPR, akan ditarik kembali ke partai. Dengan demikian, diharapkan partai akan menjadi kuat karena diasuh orang-orang yang berpengalaman.¹²

Akan tetapi pelaksanaan SK DPP-PDI No. 059/1986 ternyata tidak berjalan de-

¹⁰*Tempo*, 29 November 1986, hal. 13.

¹¹*Ibid.*

¹²Alasan ini dikemukakan oleh Nico Daryanto sebagai Sekjen DPP-PDI. Lihat *Tempo*, 20 September 1986, hal. 22-23.

ngan mulus. Tiga di antara sejumlah anggota DPR F-PDI yang terkena SK tersebut, tidak bersedia mengundurkan diri. Mereka adalah: Kemas Fachruddin (Ketua DPD-PDI Sumatera Selatan), J.C. Palaoensuka (Ketua DPD-PDI Kalimantan Barat), dan Achmad Subagio (tokoh PDI dari Jawa Tengah).¹³ Fachruddin dan Subagio berasal dari unsur PNI. Sedangkan Palaoensuka dari Partai Katolik. Mereka menganggap bahwa secara konstitusi pencalonan mereka sebagai anggota DPR tetap sah, karena mereka dicalonkan musyawarah cabang dan DPP-PDI.¹⁴

Yang menarik dari kasus "pembangkangan" ini, adalah: *pertama*, bahwa "pembangkangan" dilakukan oleh mereka yang tergolong tokoh-tokoh tua. Dua di antara ketiganya masih memegang jabatan sebagai Ketua DPD, dan dua di antara ketiganya berasal dari unsur PNI. *Kedua*, adanya pengakuan bahwa mereka tidak diberitahu oleh DPP-PDI, bahwa pencalonan mereka hanya sekedar sebagai *vote getter* (pengumpul suara) saja.¹⁵ Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa dimensi "konflik warisan" dan dimensi kepentingan pribadi masih tetap mewarnai dalam konflik intern PDI yang "terbaru" sekalipun. Juga memperkuat sinyalemen bahwa "prinsip-prinsip musyawarah belum sepenuhnya dijalankan oleh DPP-PDI di bawah Soerjadi."¹⁶

Masalah Identitas Partai

Sejak diberlakukannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap organisasi po-

litik dan organisasi kemasyarakatan, maka di Indonesia tidak lagi dibenarkan adanya ideologi lain kecuali Pancasila. Hal ini tampaknya tidak menjadi masalah bagi Golkar. Namun tidak demikian halnya bagi kedua partai politik yang lain, yaitu PDI dan PPP. Meski ini bukan berarti kedua parpol tersebut "ragu-ragu" dalam menerapkan Pancasila sebagai ideologi mereka.

Pemilu 1987 adalah pemilu pertama di mana ketiga organisasi politik peserta pemilu telah menganut ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terutama jika dilihat dari tema-tema dan suasana kampanye, kedua orpol (PDI dan PPP) masih "dibayangi" oleh ideologi lama mereka. PPP, misalnya, walaupun resminya telah menanggalkan ideologi Islam mereka, namun partai ini masih mengklaim sebagai "partainya orang-orang Islam." Hal yang serupa dialami pula oleh PDI.

Dalam pemilu yang baru lalu, PDI masih dibayangi oleh kebesaran nama bekas Presiden Soekarno. Bahkan faktor Bung Karno menjadi salah satu penentu keberhasilan setiap kampanye yang diadakan PDI, yang pada gilirannya dapat menaikkan perolehan suara partai ini. Jika PPP tampaknya masih akan tetap menggunakan "Islam" sebagai identitas (bukan ideologi) partai, mengingat basis sosial pendukung partai ini memang terdiri dari orang-orang Islam. Maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah PDI juga akan tetap memakai Bung Karno sebagai "identitas" partai?

Bila dilihat dari aspek homogenitas basis sosial pendukungnya, bagi PPP penggunaan "Islam" sebagai identitas partai tampaknya relatif tidak begitu menimbulkan permasalahan. Setidaknya jika dibandingkan dengan penggunaan Bung Karno sebagai "identitas" partai bagi PDI.

¹³*Panji Masyarakat* 550 (September 1987), hal. 13-14.

¹⁴*Tempo*, 18 Juli 1987, hal. 15-16.

¹⁵Ibid.

¹⁶Lihat uraian sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, PPP merupakan hasil fusi dari empat parpol yang mempunyai ideologi atau asas yang sama, yaitu Islam. Berbeda dengan PPP, maka PDI merupakan hasil fusi dari lima parpol dengan ideologi atau asas yang berlainan satu sama lain. PNI, misalnya, menganut paham marhaenisme-nasionalisme; IPKI berfaham nasionalisme; Partai Murba menganut ideologi sosialisme; Parkindo dan Partai Katolik menganut faham keagamaan (Kristen dan Katolik). Setelah kelima partai tersebut berfusi ke dalam PDI, 10 Januari 1973, asas masing-masing eks unsur "dilebur." Secara yuridis-formal, PDI kemudian mencoba merumuskan "identitas"-nya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya, yaitu "berwatak dan bercirikan Demokrasi Indonesia, Kebangsaan Indonesia, dan Keadilan Sosial."¹⁷

Dalam prakteknya, bila diamati dari tingkah laku politik PDI selama Pemilu 1971, 1982, dan 1987, PDI seakan-akan "mengambil-alih" identitas yang dimiliki PNI. Dari segi lambang partai, misalnya, PDI menggunakan gambar kepala banteng sebagaimana yang pernah dipakai oleh PNI (meski dalam bentuk yang berbeda). Begitu pula dalam hal warna (merah/hitam) dan simbol-simbol (Bung Karno, misalnya), semuanya menimbulkan kesan bahwa PDI adalah "penjelmaan" dari PNI. Ini bisa dimengerti mengingat PNI menjadi unsur dominan dalam tubuh PDI, dan dalam sejarah atau perjalanan kehidupan politik di Indonesia, PNI pernah tampil sebagai partai terbesar (dalam Pemilu 1955).

Dari satu sisi, "pengambil-alihan" identitas PNI, tampak memberikan keuntungan-keuntungan sesaat bagi PDI. Namun dari sisi lain, khususnya bagi perkembangan

masa depan, hal ini kurang menguntungkan bagi PDI.

Bagi eks unsur-unsur yang lain, terutama bagi Parkindo dan Partai Katolik (unsur terbesar kedua dan ketiga), "pengambil-alihan" identitas PNI oleh PDI dapat membangkitkan semacam perasaan "iri hati." Pada tanggal 20 November 1981, misalnya, eks unsur Partai Katolik dari PDI Madiun menyatakan keluar dari PDI, dengan alasan "merasakan adanya mayoritas yang dominan dan merugikan unsur minoritas."¹⁸ Frans Seda, seorang tokoh pimpinan eks Partai Katolik, pernah mengemukakan gagasan mengenai perlunya perubahan jumlah orpol di Indonesia, yaitu dari tiga menjadi lima: satu Golkar, dua partai agama, dan dua partai nasional. Gagasan tersebut secara tidak langsung bisa dianggap sebagai keinginan partai-partai Kristen (Parkindo dan Partai Katolik) untuk membentuk partai tersendiri yang berdasarkan asas keagamaan.¹⁹

Meskipun secara nasional PDI berhasil menaikkan perolehan suaranya dalam Pemilu 1987 dibanding tiga pemilu sebelumnya, namun di daerah-daerah yang tergolong basis terkuat Parkindo (yaitu Maluku) dan Partai Katolik (NTT) suara yang diraih PDI dalam Pemilu 1987 masih jauh berada di bawah yang pernah diraih mereka pada Pemilu 1971. Jika pada Pemilu 1971, di Propinsi Maluku partai-partai yang kemudian bergabung dalam PDI berhasil meraih suara 27,39% dan meraih satu kursi DPR pusat, maka dalam Pemilu 1987, PDI hanya mendapatkan suara 5,24% dan tidak berhasil meraih satu kursi pun untuk DPR pusat. Begitu pula di Propinsi NTT: dari 35,38% suara dan empat kursi DPR pusat (Pemilu 1971) menjadi 3,94% suara dan satu kursi

¹⁸Ibid., hal. 78.

¹⁹Ibid., hal. 81.

¹⁷Prisma 12 (Desember 1981), hal. 68-83.

DPR pusat (Pemilu 1987).²⁰ Ini membuktikan, meskipun PDI cukup berhasil dalam mendapatkan kembali simpati dari para pendukung eks PNI, namun PDI belum sepenuhnya berhasil meraih simpati dari kalangan eks pendukung dua partai Kristen.

Mencari identitas memang bukan masalah yang mudah. Apalagi bagi sebuah partai dengan pendukung yang begitu beragam seperti PDI. Sebagaimana telah disinggung, dalam Pemilu 1987 PDI telah resmi berasaskan Pancasila, namun partai ini masih sangat "dibayangi" oleh nama besar Bung Karno. Sehingga kesan bahwa PDI merupakan "penjelmaan" dari PNI, sulit dihindarkan. Bagaimanapun PNI identik dengan Bung Karno, dan sebaliknya.²¹

Jika di masa yang akan datang PDI masih akan tetap mempertahankan Bung Karno sebagai "identitas"nya, maka partai ini akan dihadapkan pada suasana yang dilematis (selain kemungkinan menghadapi hubungan yang sulit dengan pendukung eks dua partai Kristen, sebagaimana telah diuraikan). Di satu pihak, PDI akan dicap sebagai "sisa-sisa Orde Lama," karena Bung Karno "identik" dengan Orde Lama. Di pihak lain, khususnya oleh para Soekarno, PDI akan dituduh sebagai "hanya memanfaatkan kharisma Bung Karno untuk kepentingan-kepentingan politik sesaat."²² Karena suatu yang mustahil bagi PDI untuk sepenuhnya melaksanakan ajaran-ajaran Bung Karno (termasuk marhaenisme) yang dengan sendirinya akan bertentangan dengan UU No. 3 dan No. 8 Tahun 1985.

²⁰Lihat Tabel-tabel V.3; V.4; V.6; V.6A dalam Laporan Pemilu Tahap II.

²¹"Kami Punya Konsensus Sendiri," wawancara dengan Rachmawati Soekarno, *Topik* 11 (14 April 1987), hal. 54.

²²Ibid.

Dalam kaitannya dengan masalah identitas partai ini, agaknya yang paling memberikan peluang bagi PDI, adalah dengan menonjolkan dimensi Persatuan Indonesia (sila ketiga) sebagai identitas partai. Karena dimensi ini masih mempunyai kaitan erat dengan faham nasionalisme, namun kecil kemungkinannya bagi munculnya kecurigaan dari eks unsur dua partai Kristen.²³ Tentu saja untuk itu PDI harus berani melakukan terobosan-terobosan yang berarti. Misalnya, dengan tidak lagi mengkaitkan identitas partai dengan banyaknya massa pendukung dalam pemilu mendatang.

Masalah Kemandirian, Demokratisasi, dan Rekrutisasi

Walaupun sistem kepartaian di Indonesia telah disederhanakan, dari sepuluh orpol (pada Pemilu 1971) menjadi hanya tiga orpol (sejak 1973 sampai sekarang), namun kualitas kemandirian orpol yang terkandung di dalamnya masih relatif rendah.²⁴ Hal ini disebabkan dua faktor yang saling berkaitan satu sama lain: faktor intern dan faktor ekstern. Dari segi faktor intern, karena belum lancarnya mekanisme demokrasi di dalam tubuh orpol. Sedangkan dari segi faktor ekstern, karena masih kuatnya campur tangan birokrasi dalam kehidupan kepartaian. Akibatnya, meskipun Indonesia telah merdeka 42 tahun, namun parpol belum juga dewasa.

Jika diamati perjalanan PDI sejak berdirinya hingga saat ini, maka salah satu hal yang menonjol adalah kegagalan partai ini dalam menyelesaikan masalah-masalahnya

²³"Melepaskan Keterkurungan Ideologis," wawancara dengan Dr. Alfian, *Panji Masyarakat* 542 (11 Juni 1987), hal. 58-62.

²⁴Alfian, "Problematik dan Prospek Perkembangan Nasional Ditinjau dari Segi Sosial Politik," makalah utama KIPNAS IV.

sendiri. Budaya "restu dari atas" selalu muncul setiap kali terjadi konflik intern di tubuh PDI. Tampilnya generasi muda dalam jajaran kepemimpinan PDI serta keberhasilannya mereka dalam Pemilu 1987, ternyata tidak menjamin peningkatan kualitas kemandirian partai ini.

Kasus yang masih hangat, yang terjadi se usai Pemilu 1987, adalah kegagalan Soerjadi dan kawan-kawan dalam menyelesaikan soal "pembangkangan" tiga anggota DPR F-PDI. Masalah itu "diselesaikan" setelah adanya campur tangan dari Menteri Dalam Negeri, Soepardjo Rustam. Ironisnya, "penyelesaian" kasus tersebut justru menimbulkan kesan ketidaktegasan DPP Soerjadi dalam menerapkan aturan permainan yang mereka buat sendiri. Karena ketiga anggota DPR F-PDI yang terkena SK DPP-PDI No. 059/1986, yang seharusnya tidak berhak lagi duduk sebagai anggota DPR, pada akhirnya masih tetap menjadi anggota DPR F-PDI.²⁵ Kasus lain yang menunjukkan masih rendahnya kualitas kemandirian PDI, adalah masalah pengisian jabatan Wakil Ketua DPR/MPR periode 1987-1992 dari unsur PDI dan jabatan Ketua Fraksi PDI untuk periode yang sama. Pihak DPP sudah menetapkan Soerjadi sebagai calon Wakil Ketua DPR/MPR dan Fatimah Ahmad (seorang fungsionaris DPP) sebagai calon Ketua F-PDI. Namun sejumlah tokoh tua anggota Fraksi PDI yang dimotori Ahmad Subagio, Dudy Singadilaga, dan Yusuf Merukh (ketiganya dari eks unsur PNI) mengajukan calon lain, yaitu Subagio sebagai calon Wakil Ketua DPR/MPR dan Dudy sebagai calon Ketua F-PDI. Dengan alasan kedua orang tersebut lebih memenuhi kriteria dibanding calon-calon

yang diajukan DPP. Untuk lebih "melicinkan jalan" bagi calon-calonnya, DPP-PDI menghadap DPP-Golkar.²⁶

Dari kedua kasus di atas terlihat jelas betapa PDI pasca-Pemilu 1987 masih mempertahankan pola hubungan yang mencerminkan "ketergantungan ke atas."²⁷ Pola yang memang sudah "dianut" partai ini semenjak berdirinya. Ini berarti prinsip-prinsip demokrasi masih belum berjalan di tubuh partai yang menggunakan nama demokrasi itu. Padahal dengan tampilnya generasi Soerjadi semula diharapkan partai ini akan meninggalkan pola-pola lama mereka.

Dari segi faktor ekstern, kuatnya campur tangan birokrasi dalam kehidupan PDI, tidak terlepas dari dua hal. *Pertama*, berkaitan dengan kondisi lingkungan sistem politik Indonesia pada umumnya yang masih menonjolkan dimensi preventif.²⁸ Dan *kedua*, adanya kenyataan bahwa pemerintah bertindak selaku pembina parpol, serta besarnya ketergantungan parpol pada dana pemerintah.²⁹

Masalah terakhir, adalah masalah rekrutasi. Ini berkaitan dengan masalah kaderisasi. Selama ini, PDI bisa dikatakan tidak mempunyai pola-pola khusus dalam mencekik kader-kadernya. kaderisasi dan rekrutasi yang berlaku di PDI berjalan melalui eks unsur-unsur pendukungnya.³⁰ Kader-kader atau calon-calon pemimpin PDI diajukan oleh unsur atau ormas-ormas yang semula merupakan *onderbouw* unsur-unsur bersangkutan. Sebagai contoh, Soerjadi yang

²⁶Editor, 3 Oktober 1987, hal. 15-16.

²⁷Kaisieppo, *Dilemma*, hal. 74.

²⁸Aifian, *Problematik*, hal. 3 dan seterusnya.

²⁹Wawancara dengan Wakil Ketua F-PDI DPRD Sumatera Utara L.M. Sinaga dan Wakil Bendahara Zulkifli Chan, Medan, 7 September 1987.

³⁰Kaisieppo, *Dilema*, hal. 71-74.

²⁵Padahal Sekjen DPP-PDI Nico Daryanto pernah mengatakan bahwa DPP-PDI akan melangkah terus dengan konsep-konsep yang sudah digariskan, dan akan konsisten melaksanakannya. Lihat *Tempo*, 27 September 1986, hal. 12.

kini memegang jabatan sebagai Ketua Umum DPP-PDI, semula adalah seorang pemimpin GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) yang selama ini dikenal sebagai *onderbouw*-nya PNI. Begitu pula sebagian besar mereka yang duduk di DPP-PDI. Ada yang berasal dari GPM (Gerakan Pemuda Marhaen) yang juga berafiliasi pada PNI; ada pula yang berasal dari GMKI (yang berafiliasi pada Parkindo) dan PMKRI (Partai Katolik).

Yang menjadi pertanyaan, setelah diberlakukannya UU No. 3 dan No. 8 Tahun 1985, yang antara lain menyebutkan bahwa keanggotaan orpol berdasarkan perorangan, apakah pola-pola kaderisasi dan rekrutasi sebagaimana sekarang masih akan dipertahankan? Dengan adanya UU tersebut, berarti secara yuridis formal PDI tidak lagi mempunyai kaitan dengan ormas-ormas pendukungnya. Meskipun tidak tertutup kemungkinan masih diterapkannya pola-pola lama, namun ada kecenderungan PDI juga berusaha memakai pola-pola baru. Misalnya, sebagian dari fungsionaris DPP-PDI sekarang terdiri dari para pekerja profesional dan atau berlatar belakang akademis. Mereka ini sebelumnya kurang begitu dikenal di gelanggang politik nasional. Tidak mengherankan bila ada sebuah mass media yang menulis: "pemimpin baru PDI mengesankan sebuah pendekatan yang terlalu akademis dan idealistis."³¹ Dalam rangka kaderisasi dan rekrutasi, DPP-PDI juga berusaha lebih mengfungsiakan departemen-departemen kewanitaan dan kepemudaan. Hal ini dimaksudkan sebagai pengganti kaderisasi dan rekrutasi melalui ormas-ormas eks pendukungnya.³²

Penutup

Pemilu 1987 telah memberikan makna tersendiri bagi PDI. Partai ini telah memperoleh hasil yang mengejutkan banyak kalangan. Padahal PDI tampil dalam arena Pemilu 1987 masih dalam suasana konsolidasi. Oleh karenanya mereka tampil tanpa target tertentu. Tapi justru karena itulah mereka tidak memiliki beban apa pun, yang pada akhirnya justru membuahkan hasil yang tak terduga sebelumnya.

Banyak faktor yang menyebabkan keberhasilan PDI dalam Pemilu 1987. Salah satu di antaranya adalah naiknya generasi muda dalam tampuk kepemimpinan partai ini. Mereka (Soerjadi dan kawan-kawan) dinilai relatif "bersih" dari konflik-konflik masa silam. Sehingga banyak harapan tertumpu pada mereka. Apalagi setelah mereka terbukti mampu meningkatkan citra PDI.

Namun, apa yang terjadi kemudian (setelah Pemilu 1987) justru membuktikan belum berhasilnya DPP Soerjadi dalam mengatasi masalah-masalah yang mendasar dan kompleks yang menyelimuti PDI selama bertahun-tahun. Konflik-konflik intern, baik yang berdimensi kepentingan pribadi maupun "konflik warisan," kembali muncul ke permukaan.

Ketidakmampuan DPP Soerjadi terlihat dari pilihan yang mereka ambil dalam menyelesaikan konflik-konflik intern. Mereka lebih mengandalkan campur tangan birokrasi guna menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Akibatnya, "penyelesaian" cenderung hanya bersifat sementara, yang berarti konflik-konflik baru setiap saat dapat muncul kembali.

Di satu sisi, ketergantungan pada "restu dari atas," menunjukkan bahwa, *pertama*,

³¹Tempo, 17 Januari 1987, hal. 13-14.

³²Wawancara dengan Sinaga dan Zulkifli Chan.

sebagai partai politik, PDI masih rendah kualitas kemandiriannya. Dan *kedua*, menunjukkan masih tersendatnya proses demokratisasi dalam tubuh PDI. Di sisi lain, besarnya campur tangan birokrasi dalam kehidupan PDI pada khususnya, dan kehidupan parpol pada umumnya, tampaknya menjadi sesuatu yang tak bisa dihindarkan pada masa sekarang. Ini berkaitan dengan situasi lingkungan sistem politik Indonesia secara keseluruhan yang masih menonjolkan dimensi preventif.

Jika di masa yang akan datang PDI masih tetap mempertahankan pola hubungan yang mencerminkan "ketergantungan ke atas," partai ini akan terpenjara oleh masa lalunya sendiri. Dan bukan suatu yang mustahil bila PDI akan kehilangan kepercayaan dari massa pendukungnya pada pemilu mendatang, yang pada pemilu lalu sudah sangat antusias dalam memberikan dukungan mereka. Bila mereka tidak ingin hal itu terjadi, DPP-PDI harus berani melakukan terobosan-terobosan yang bermakna, khususnya dalam meningkatkan kualitas kemandirian PDI.

Keberanian melakukan terobosan-terobosan yang bermakna, juga diperlukan DPP-PDI untuk menampilkan identitas partai, terutama setelah diberlakukannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap orpol dan ormas. Bila PDI masih tetap mempertahankan faktor Bung Karno sebagai "identitas" partai, dengan pertimbangan kekhawatiran kehilangan para pendukung tradisionalnya, maka PDI akan dihadapkan pada suasana yang dilematis. Di satu pihak

PDI akan tetap dicap sebagai "sisa-sisa Orde Lama." Sedangkan di lain pihak, PDI akan dituduh sebagai "penunggang nama besar Bung Karno." Karena mereka akan dinilai sekedar memanfaatkan kharisma Bung Karno untuk tujuan-tujuan politik sesaat. Sementara ajaran-ajaran Soekarno yang sesungguhnya tidak mungkin mereka anut. Untuk itu, jalan yang paling memberikan peluang bagi PDI adalah dengan mengembangkan dimensi Persatuan Indonesia sebagai identitas partai.

Dalam hal rekrutasi dan kaderisasi, PDI tampaknya akan mengkombinasikan antara pola-pola lama dan pola-pola baru. Pola-pola lama adalah dengan melalui eks unsur-unsur pendukung PDI dan atau melalui ormas-ormas yang pernah menjadi *onderbouw* mereka. Sedangkan pola-pola baru adalah dengan memasukkan para pekerja profesional dan atau mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan akademis, meskipun kurang berpengalaman dalam karier politik, sebagaimana yang tergambar dari komposisi DPP-PDI sekarang. PDI juga berusaha lebih mengaktifkan lembaga-lembaga otonom yang ada di bawah DPP, seperti departemen kepemudaan dan kewanitaan. Masih sulit diperkirakan bagaimana hasil pola-pola kaderisasi dan rekrutasi yang dijalankan DPP-PDI sekarang. Yang jelas, tampilnya mereka yang kurang berpengalaman di bidang politik sebagai pemegang pos-pos penting dalam DPP, kurang menguntungkan bagi masa depan PDI. Hal ini mengingat belum terpecahkannya masalah-masalah yang mendasar dan kompleks di tubuh PDI.